

**IMPLEMENTASI PROGRAM MINAPOLITAN DI DESA BLAYU KECAMATAN  
WAJAK KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**OLEH :**

**ANGELA NATALIE PUSPITANINGSIH**

**NIM : 115080401111012**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2015**

**IMPLEMENTASI PROGRAM MINAPOLITAN DI DESA BLAYU KECAMATAN  
WAJAK KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR**

**SKRIPSI  
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan  
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Universitas Brawijaya**

**OLEH :  
ANGELA NATALIE PUSPITANINGSIH  
NIM : 115080401111012**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2015**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM MINAPOLITAN DI DESA BLAYU KECAMATAN  
WAJAK KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

Oleh :

ANGELA NATALIE PUSPITAINGSIH

NIM. 115080401111012

Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal : 8 Juni 2015  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Tanggal :

Dosen Penguji I

(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)  
NIP. 19640226 198903 2 003  
Tanggal :

Dosen Penguji II

(Zainal Abidin, S.Pi, MP, MBA)  
NIP. 19770221 200212 1 008  
Tanggal :

Menyetujui  
Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)  
NIP. 19591205 198503 1 003  
Tanggal:

Dosen Pembimbing II

(Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si.)  
NIP. 19740220 200312 2 001  
Tanggal:

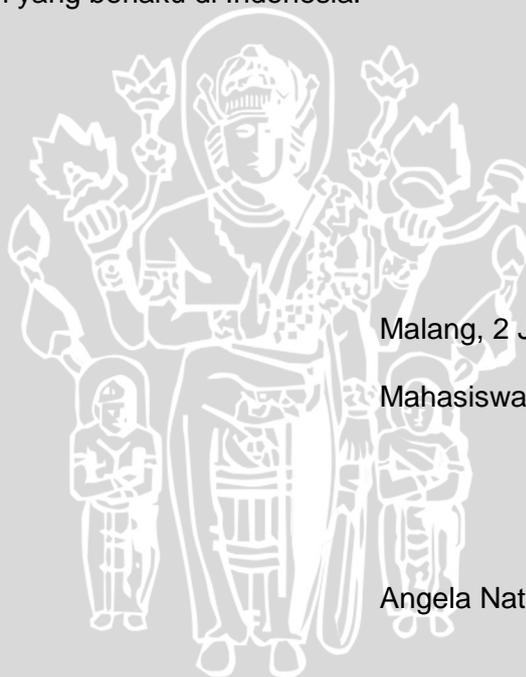
Mengetahui  
Ketua Jurusan

(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)  
NIP.19610417 199003 1 001  
Tanggal:

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.



Malang, 2 Juni 2015

Mahasiswa

Angela Natalie P.

## RINGKASAN

**ANGELA NATALIE PUSPITANINGSIH.** Skripsi tentang Implementasi Program Minapolitan di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS** dan **Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si.**)

---

Upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan, pendapatan nelayan dan pendapatan pembudidaya ikan adalah dengan menggagas gerakan Revolusi Biru yang dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan minapolitan. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 yang berisikan tentang pedoman umum Minapolitan. Kawasan minapolitan dikembangkan dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan dan pemasaran. Dibutuhkan partisipasi pemerintah dan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan Program Minapolitan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada bulan Maret 2015. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu, Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program, dan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Minapolitan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel pada DKP, BPP, dan Balai Desa Blayu, serta menggunakan teknik sensus untuk pengambilan sampel pada petani mina mendong dan mina padi. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Minapolitan yaitu informasi, isi program, dukungan, dan pembagian potensi. Penyampaian informasi dilakukan dengan pendekatan secara individu dan pendekatan secara kelompok, dan dengan membuat Demplot. Kegiatan penunjang untuk pengembangan kawasan minapolitan yang dicanangkan DKP Kabupaten Malang antara lain pengembangan budidaya, pembinaan pasca panen, pembinaan pengembangan usaha perikanan, dan beberapa kegiatan penunjang lainnya seperti pelayanan sarana produksi, pelayanan informasi teknologi spesifik lokasi, pelayanan perlindungan ikan, pelayanan pembenihan, pembinaan penyuluhan, pengairan, transportasi, energi, sarana dan prasarana pemasaran, serta lembaga keuangan/permodalan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Minapolitan antara lain berperan dalam pembangunan jalan-jalan yang ada di desa, pembangunan kolam beton, pembangunan mina mendong, pengadaan sarana produksi budidaya ikan, serta bantuan-bantuan lainnya. Pada pelaksanaan program, DKP bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara Koperasi dan PKM, Pemerintah Daerah, Investor, Perguruan Tinggi, swasta, kelompok kerja, Unit Pelaksana Usaha Terpadu, Kelompok Usaha Bersama, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Realisasi dalam pelaksanaan Program Minapolitan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain pengadaan benih ikan nila untuk kelompok budidaya ikan, pengadaan induk ikan nila untuk kelompok budidaya ikan, pelatihan budidaya ikan, peningkatan Jl. Bebekan yang dalam kondisi berbatu dan dalam kondisi jalan tanah, peningkatan Jl. Pijetan yang dalam kondisi berbatu,

pengadaan demo plot tentang budidaya ikan nila dan pendampingan kelompok budidaya ikan, pengadaan tempat penanganan ikan hidup, pengadaan sarana prasarana kampung nila, dan pengadaan mesin pakan ikan alternatif. Petani mina mendong dan mina padi ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Minapolitan walaupun tidak semua petani tergabung dalam kelompok tani Ngudi Mulyo III. Petani menjalankan sistem mina padi dan mina mendong tanpa adanya paksaan karena pemerintah juga menyediakan bantuan benih sebagai modal awal petani menggunakan sistem mina mendong dan mina padi.

Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu antara lain adanya sumber mata air yang mencukupi, dukungan petani dengan menyediakan lahan siap pakai, dukungan dari pemerintah dengan memberikan bantuan benih, fasilitas untuk budidaya ikan, dan perbaikan jalan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Minapolitan Di Desa Blayu antara lain masih terdapat beberapa DAM yang belum permanen, harga pakan ikan yang semakin mahal, semakin berkurangnya buruh pemotong mendong, dan belum meratanya bantuan dari pemerintah.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat, rahmat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyajikan Laporan Skripsi yang berjudul Implementasi Program Minapolitan di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi implementasi Program Minapolitan, partisipasi dalam pelaksanaan Program Minapolitan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan capaian Program Minapolitan di Desa Blayu.

Pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, materi dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materi selama menyelesaikan Skripsi ini hingga laporan ini selesai.
2. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Ibu Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas segala pelajaran, petunjuk, informasi serta waktu untuk membimbing saya sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Ir. Sumbodo Kresno Y. selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya, ibu Ir. Susi Hayuningtyas selaku Kepala Seksi Budidaya Ikan, bapak Wiwin selaku Penyuluh lapang, bapak Mujib selaku pegawai Balai Desa Blayu, serta petani mina mendong dan mina padi di Desa Blayu yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang telah memberikan informasi selama menyelesaikan Skripsi ini.

4. Sahabat-sahabat SPS yang telah membantu penyusunan Skripsi baik dukungan moril maupun semangatnya.
5. Teman-teman SEPK 2011 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu penyelesaian Skripsi ini.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.



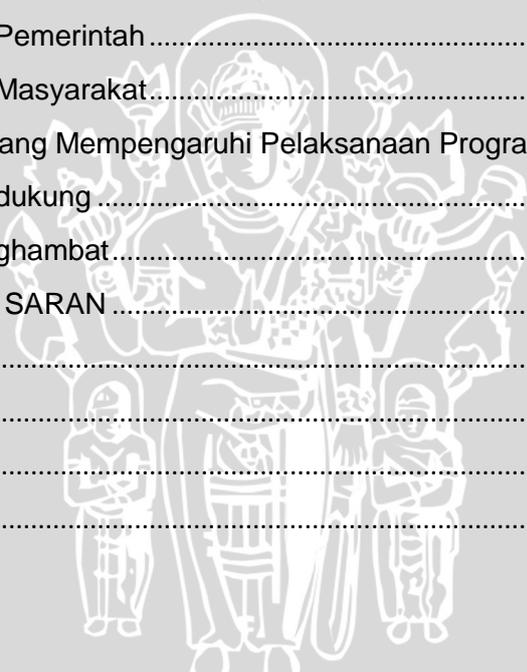
Malang, 2 Juni 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Kebijakan Publik.....	6
2.3 Minapolitan.....	8
2.4 Implementasi Kebijakan.....	16
2.5 Partisipasi Masyarakat.....	17
2.6 Kerangka Berfikir.....	18
3. METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.2 Obyek Penelitian.....	21
3.3 Jenis Penelitian.....	21
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4.1 Data Primer.....	22
3.4.2 Data Sekunder.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5.1 Observasi.....	24
3.5.2 Wawancara.....	25
3.5.3 Dokumentasi dan Studi Pustaka.....	25
3.6 Metode dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
3.7 Analisis Data.....	27

4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	29
4.1 Keadaan Umum.....	29
4.1.1 Letak Geografis Dan Topografis .....	29
4.1.2 Keadaan Umum Penduduk.....	30
4.1.3 Keadaan Perikanan.....	32
4.2 Program Minapolitan.....	34
4.2.1 Penetapan Kawasan Minapolitan.....	34
4.2.2 Informasi.....	35
4.2.3 Isi dan Capaian Program.....	37
4.2.4 Dukungan.....	46
4.2.5 Pembagian Tugas Antar Instansi Dalam Program Minapolitan.....	47
4.3 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program .....	52
4.3.1 Partisipasi Pemerintah .....	52
4.3.2 Partisipasi Masyarakat.....	55
4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Minapolitan..	57
4.4.1 Faktor Pendukung .....	57
4.4.2 Faktor Penghambat.....	58
5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN .....	64



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Data Primer.....	23
Tabel 2. Data Sekunder .....	24
Tabel 3. Kelompok Sampel dalam Penelitian .....	27
Tabel 4. Analisa Data .....	28
Tabel 5. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	30
Tabel 6. Jumlah Angkatan Kerja.....	31
Tabel 7. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	32
Tabel 8. Produksi Kabupaten Malang Per Komoditas (2011 - 2013).....	33
Tabel 9. Evaluasi Program Minapolitan.....	52



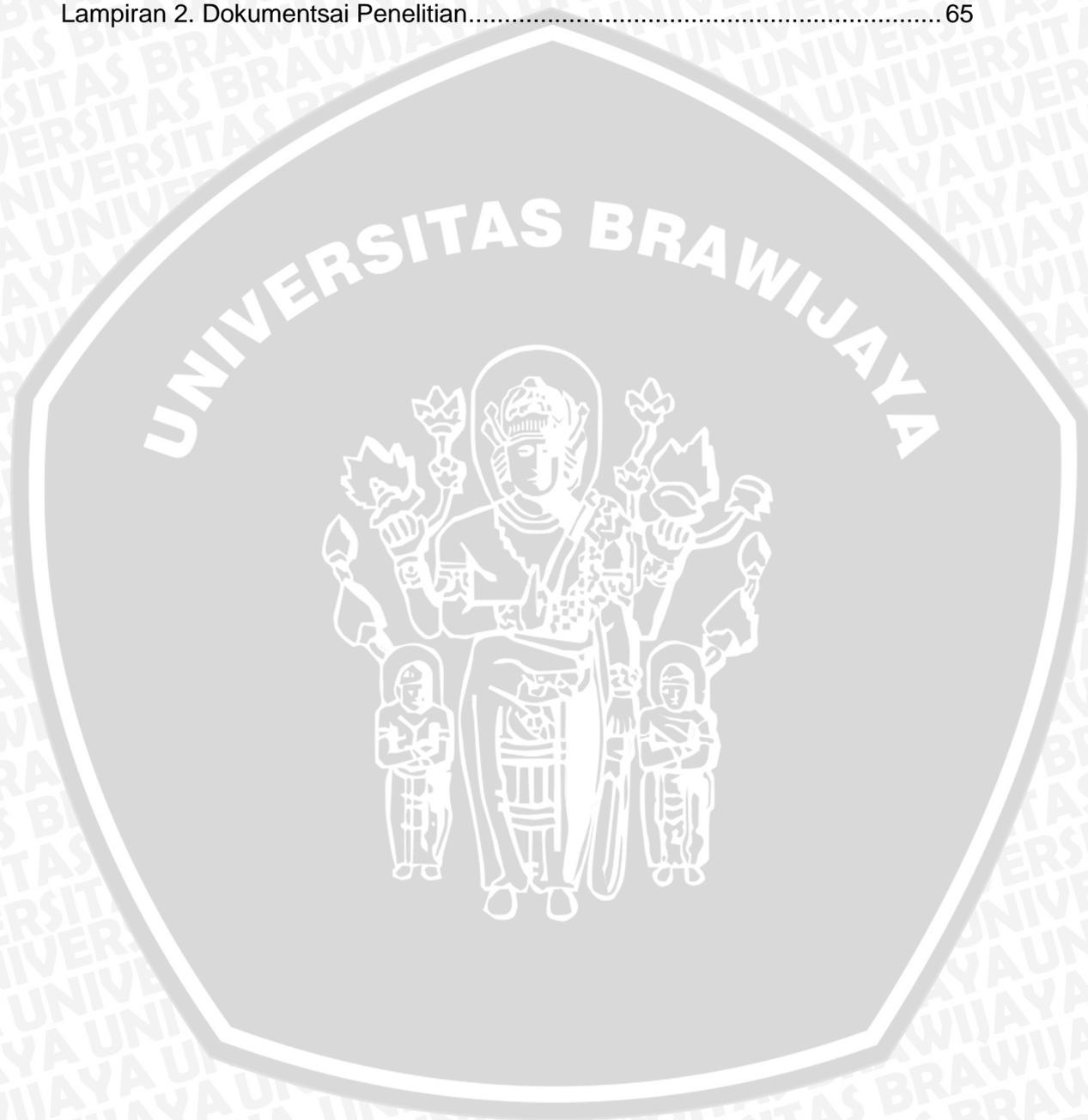
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian ..... 20



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian.....	64
Lampiran 2. Dokumentsai Penelitian.....	65



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi mata pencaharian terpenting, hal ini ditunjukkan dengan luas lahan pertanian Indonesia mencapai kurang lebih 82,71% dari total keseluruhan luas lahan di Indonesia. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia tidak kalah pentingnya dengan sektor pertanian, hal ini ditunjukkan dengan dua per tiga wilayah Indonesia berupa perairan sehingga sumberdaya perikanan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pembangunan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan, pendapatan nelayan dan pendapatan pembudidaya ikan, Kementrian Kelautan dan Perikanan menggagas gerakan Revolusi Biru yang merupakan perubahan cara berpikir dari negara Kontinental (daratan) menjadi negara Bahari (kelautan). Gerakan Revolusi Biru ini dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi agar tercapainya peningkatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 yang berisikan tentang pedoman umum Minapolitan. Program pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktifitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan, serta untuk meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengelolaan ikan yang adil dan merata. Kawasan

minapolitan juga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah (Muchlisin *et all*, 2012). Kawasan minapolitan dikembangkan dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan dan pemasaran.

Penyebaran kawasan minapolitan tersebar merata di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2011 yang berisikan tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan minapolitan terdapat 223 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan minapolitan. Untuk wilayah Jawa Timur terdapat 12 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan minapolitan dan salah satunya adalah Kabupaten Malang.

Di Kabupaten Malang terdapat 2 Kecamatan yang menjadi sentra kawasan minapolitan. Untuk sentra kawasan minapolitan bidang budidaya berada di Kecamatan Wajak yang juga ditunjang oleh beberapa kecamatan lainnya yang merupakan *hinterland* (daerah penyangga). Untuk sentra kawasan minapolitan bidang penangkapan berada di kawasan Sendangbiru yang berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Potensi bidang budidaya di Kabupaten Malang sangat besar, hal ini didukung dengan potensi budidaya kolam yang luasnya mencapai 1.138,88 Ha, potensi mina padi yang luasnya mencapai 10 Ha, potensi mina mendong yang luasnya mencapai lebih dari 200 Ha, potensi jaring sekat mencapai 400 unit, dan potensi tambak yang luasnya lebih dari 100 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang (Rahmat, 2014).

Mina mendong merupakan salah satu sistem yang dapat terus dikembangkan di Kecamatan Wajak karena Kecamatan Wajak merupakan sentra budidaya mendong. Desa Blayu merupakan salah satu desa yang menggunakan sistem mina mendong. Sistem mina mendong adalah sistem yang digunakan dalam kegiatan pertanian yang menggabungkan kegiatan budidaya ikan air tawar

di sawah dengan bertani tanaman mendong. Budidaya mina mendong di Desa Blayu sudah dilaksanakan sejak Tahun 2009 dan terus berkembang hingga sekarang dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan nila, ikan koi dan udang galah. Sistem pertanian lain yang digunakan di Desa Blayu adalah sistem mina padi. Sistem mina padi adalah sistem yang digunakan dalam kegiatan pertanian dengan menggabungkan kegiatan budidaya ikan air tawar dengan bertani padi. Sistem mina padi ini baru mulai dikembangkan di Desa Blayu sehingga masih sedikit petani padi yang menggunakan sistem ini.

Pengembangan kawasan minapolitan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan apabila ada partisipasi dari masyarakat untuk mendukung pengoptimalan potensi perikanan Indonesia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Sehingga peran aktif masyarakat sangat penting bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Dari penjelasan diatas memunculkan pertanyaan bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan pelaksanaan Program Minapolitan dengan sistem mina mendong dan mina padi khususnya di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian ini, maka perumusan permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu?

### 1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis:

1. Program Minapolitan di Desa Blayu.
2. Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu.
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pemerintah

Sebagai bahan informasi serta bahan pertimbangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dalam program Minapolitan.

2. Petani

Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kelompok tani dan mengembangkan usahanya.

3. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian

Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, serta sebagai informasi keilmuan untuk menambah wawasan pengetahuan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Ansoriyah (2014) tentang Implementasi Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor PER 12/MEN/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidoarjo, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai kebijakan pengembangan kawasan minapolitan menyebabkan rendahnya respon masyarakat. Belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD menjadikan implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih harus terus menggalakan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan minapolitan.

Penelitian Sugiarti (2013) tentang Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Pacitan, banyaknya faktor yang menyebabkan pola pembangunan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal dan berkesinambungan. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya perencanaan pengembangan yang komprehensif, integratif dan berkelanjutan. Daya tarik wisata yang terdapat di kawasan minapolitan Kabupaten Pacitan, khususnya di kawasan zona inti PPP Tamperan dan sekitarnya berupa suasana pantai dan laut, potensi wisata boga, tempat pelelangan ikan dan sentra pengolahan hasil laut yang dapat berperan sebagai alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, pihak swasta dan pemerintah Kabupaten Pacitan. Agar pengembangan kawasan minapolitan

sebagai daya tarik wisata di wilayah tersebut dapat berlanjut, maka diperlukan peningkatan fasilitas atau sarana prasarana yang dapat mendorong pembangunan kawasan minapolitan sebagai daya tarik wisata minat khusus.

Penelitian Salenussa (2012) tentang Implementasi Program Pemberdayaan Minapolitan Di Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat, kurang maksimalnya respon masyarakat terhadap pelaksanaan program minapolitan dikarenakan beberapa faktor. Implementasi program minapolitan yang belum berjalan dengan baik karena adanya berbagai kendala seperti kurang tepatnya kelompok sasaran, kurangnya komunikasi antar aparat, kegiatan monitoring yang tidak dilakukan secara berkala, kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program minapolitan. Untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap pelaksanaan program minapolitan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah kabupaten perlu melakukan berbagai perbaikan, seperti monitoring rutin, verifikasi ulang penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi rutin antar aparat dan masyarakat, legislasi peraturan pelaksanaan program minapolitan, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang berkenaan dengan penyaluran bantuan.

## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatasi masalah publik yang memiliki tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Menurut Anderson (1979) dalam Koryati *et all* (2004) menyatakan bahwa:

- 1) Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan atau selalu berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan berisikan tindakan-tindakan pejabat pemerintah.

- 3) Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah bukan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah bersifat positif dalam arti merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah berdasarkan atau berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Jenis kebijakan publik menurut Anderson (1970) dalam Wijayanti (2013) antara lain:

- 1) *Substantive and Procedural Policies*

*Substantive policy* adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. *Procedural policy* adalah kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak

- 2) *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

*Distributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan kepada individu, kelompok, maupun perusahaan. *Redistributive policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, dan hak-hak. *Regulatory policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap suatu tindakan atau perbuatan tertentu.

- 3) *Material Policy*

*Material Policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

- 4) *Public Goods and Private Goods Policies*

*Public Goods Policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau fasilitas-fasilitas dari pemerintah untuk memenuhi kepentingan orang banyak. *Private Goods Policy* kebijakan yang mengatur

tentang penyediaan barang-barang atau fasilitas-fasilitas dari pihak swasta untuk kepentingan individu atau perorangan di pasar bebas dengan imbalan tertentu.

Menurut Dwidjowijoto (2006), kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mampu mendorong setiap masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan terhadap pihak-pihak lain.

### 2.3 Minapolitan

Kata Minapolitan berasal dari kata mina yang berarti ikan dan kata politan (polis) yang berarti kota, sehingga kata Minapolitan dapat diartikan sebagai kota ikan. Minapolitan berkaitan dengan pengembangan suatu kawasan atau kota yang memiliki sumberdaya ikan yang menonjol dan dapat dikembangkan sebagai produk unggulan dari daerah tersebut (Sugiarti, 2013). Minapolitan merupakan pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Zulham (2010), Minapolitan adalah konsep pembangunan wilayah yang berbasis pada perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah. Konsep Minapolitan menggunakan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip :

- 1) Prinsip integrasi, diharapkan mampu mendorong agar pengalokasian pembangunan sumberdaya dapat direncanakan dan dialokasikan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan dari *stakeholder* (instansi sektoral, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat) sehingga program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana dan prasarana produksi yang

memadai, permodalan, sumberdaya manusia, serta sistem manajemen yang baik.

- 2) Prinsip efisiensi, agar pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sedikit namun tetap memiliki daya guna yang tinggi sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal. Prinsip efisiensi juga diharapkan dapat mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya yang murah, efisiensi dan didukung dengan faktor-faktor produksi yang sesuai kebutuhan sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang kompetitif secara ekonomi.
- 3) Prinsip berkualitas, proses pelaksanaan pembangunan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia sehingga dapat dilakukan secara intensif.
- 4) Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dipenuhi dalam waktu cepat melalui inovasi dan kebijakan terobosan sehingga melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia, Indonesia dapat mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011, Minapolitan mempunyai 2 unsur utama, yaitu:

- 1) Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah.
- 2) Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan produk kelautan dan perikanan sebagai komoditas utama.

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu demokratisasi ekonomi kelautan yang pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui

pemberdayaan masyarakat, dan penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara menjadi lebih kuat.

Konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan sumberdaya pembagunan yang terdiri dari sarana produksi, anggaran, permodalan, maupun prasarana produksi yang dapat dikonsentrasikan di lokasi-lokasi potensial, sehingga peningkatan produksi kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipacu lebih cepat. Diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi dan perdagangan yang saling mendukung agar kawasan minapolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang sehat. Keanekaragaman kegiatan produksi akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Minapolitan perikanan terdiri dari minapolitan perikanan tangkap laut, minapolitan perikanan budidaya, dan minapolitan perairan umum. Pada minapolitan perikanan tangkap laut, kawasan pelabuhan perikanan menjadi inti dari minapolitan dengan komoditas utamanya adalah ikan tuna. Pada minapolitan perikanan budidaya, kawasan budidaya yang memenuhi skala ekonomi menjadi inti dari minapolitan. Minapolitan pada kawasan umum mencakup upaya produksi pengelolaan hasil perikanan perairan umum (Zulham, 2010).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 karakteristik kawasan minapolitan meliputi:

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan.

2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi.
3. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan daerah sekitarnya.
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan.
2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi:
  - a. Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan.
  - b. Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - 1) Memiliki pasar: lokal, nasional atau internasional.
    - 2) Volume atau kemampuan produksi tinggi: dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar.
    - 3) Tingkat produktivitas tinggi: kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan.
    - 4) Jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut.
    - 5) Mempunyai keunggulan komparatif: mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah.

- 6) Mempunyai keunggulan kompetitif: produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif.
3. Letak geografis kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi:
    - a. Lokasi kawasan strategis:
      - 1) Jarak dan sistem transportasi
      - 2) Mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan - *supply chains*).
    - b. Kawasan yang secara alami cocok untuk usaha perikanan:
      - 1) Kaya SDA, subur, dan air melimpah.
      - 2) Tempat pendaratan ikan (tangkap).
      - 3) Dekat dengan *fishing ground* (tangkap).
  4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait, meliputi:
    - a. Sistem dan mata rantai produksi perikanan budidaya
      - 1) Keberadaan sejumlah unit produksi ikan budidaya yang aktif berproduksi dan terkonsentrasi di sentra produksi.
      - 2) Mata rantai produksi:
        - Keberadaan sarana/lahan produksi: kolam dan tambak yang cukup luas.
        - Fasilitas pengairan yang baik dan mencukupi atau potensi pengairan yang mungkin dikembangkan.

- Ketersediaan benih berkualitas tinggi atau kemungkinan pengadaan benih dengan harga murah.
  - Ketersediaan pakan dan obat-obatan yang murah.
  - Telah diterapkan sistem budidaya yang baik sehingga tingkat produksinya cukup tinggi dan berkualitas.
  - Keterlibatan pembudidaya dan para pekerja setempat.
  - Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik.
  - Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- b. Sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap
- 1) Keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif memproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut; dan
  - 2) Mata rantai produksi:
    - Hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi;
    - Keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai;
    - Sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat;
    - Keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat;
    - Kegiatan di lokasi/pelabuhan perikanan/tpi mempunyai skala ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di sekitarnya;
    - Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik.

- Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

c. Sistem dan mata rantai produksi hilir

- 1) Keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat.
  - 2) Keberadaan kelembagaan/SDM pengawasan mutu.
  - 3) Sistem tata niaga produk hasil olahan dan fasilitas pendukungnya.
  - 4) Keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk.
  - 5) Sistem dan sarana distribusi produk di dalam maupun ke luar kawasan.
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan, meliputi:
- a. Permodalan: Aksesibilitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan terhadap bantuan permodalan.
  - b. Kelembagaan: lembaga pemerintahan daerah pembina.
  - c. Lembaga usaha: koperasi, kelompok usaha atau usaha skala menengah dan atas.
  - d. Penyuluhan dan pelatihan: Lembaga dan SDM Penyuluhan dan Pelatihan.
  - e. Prasarana pengairan: Keberadaan jaringan pengairan (budidaya) utama/primer, sekunder atau lainnya sebagai pendukung sistem pengairan di kawasan.
  - f. Energi: Jaringan listrik yang memadai.
  - g. Teknologi tepat guna: Penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing.

6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan, meliputi:
  - a. Kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung)
  - b. Dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan.
  - c. Sesuai tata ruang daerah dan nasional.
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan, meliputi:
  - a. Sesuai Renstra dan Tata Ruang Daerah dan Nasional.
  - b. Masuk ke dalam RPIJM.
  - c. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
  - d. Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak.
  - e. Kontribusi anggaran APBD atau sumberdana lain yang sah.
  - f. Keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai.
  - g. Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat.
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi:
  - a. Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
  - b. Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan.
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi:
  - a. Mempunyai data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait.

- b. Mempunyai sistem pencatatan data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan.

#### 2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah respon dari suatu kebijakan yang dilakukan dengan aksi atau tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten agar tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Proses penetapan kebijakan dapat diimplementasikan bila tujuan dan sasaran sudah terperinci dengan jelas, program telah dirancang dan dana yang akan digunakan sudah teralokasikan. Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya (*policy stakeholder*) dan lingkungan (*environment*), karena mereka dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan pemerintah (Koryati *et al*, 2004).

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya kesesuaian antar penerapan kebijakan dengan rancangan, tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dan dapat memberikan dampak atau hasil yang positif untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi. Menurut Jan Merse *dalam* Koryati *et al* (2004) faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Informasi

Informasi diperlukan sebagai sarana penyatuan pemahaman, visi dan misi kebijakan yang telah dirumuskan. Kekurangan informasi akan menyebabkan kurang tepatnya pelaksanaan dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

- b. Isi Kebijakan

Isi dari kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya, sehingga isi kebijakan haruslah jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholder*.

c. Dukungan

Program akan berlangsung secara berkelanjutan bila adanya dukungan dari masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder*. Dukungan diperlukan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun evaluasi dari tiap-tiap program yang dikerjakan.

d. Pembagian Potensi

Pebagian potensi berkaitan dengan kinerja koodinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik dari pemerintah, swasta serta masyarakat luas.

## 2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses pemberian kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk bersama-sama memecahkan berbagai masalah yang ada sehingga dapat memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk berkontribusi langsung agar implementasi kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Kristanto, 2010).

Menurut Soetrisno (1995), selama ini terdapat dua definisi partisipasi masyarakat yang beredar di Indonesia karena belum adanya definisi baku mengenai partisipasi masyarakat sehingga pemilihan penggunaan definisi partisipasi masyarakat akan mempengaruhi model perencanaan yang dipilih oleh para perencana pembangunan. Definisi pertama adalah partisipasi masyarakat sebagai dukungan rakyat terhadap rencana pembangunan yang telah dirancang dan telah ditentukan tujuannya oleh perencana pembangunan. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dapat diukur dari seberapa besar kemauan masyarakat dalam menyumbangkan uang maupun tenaga dalam proyek pembangunan pemerintah. Definisi kedua adalah partisipasi masyarakat sebagai hubungan yang erat antara perencana pembangunan dengan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil

pembangunan yang telah dicapai. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga dengan ikut serta dalam menentukan arah dan tujuan proyek pembangunan serta ada tidaknya kemauan untuk melestarikan dan mengembangkan hasil dari proyek yang telah dijalankan.

Partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun keikutsertaan secara tidak langsung. Namun, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dengan banyaknya jumlah individu yang dilibatkan dalam program. Padahal partisipasi masyarakat berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Sejauh ini partisipasi masyarakat hanya terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan program saja, melainkan juga diperlukan mulai dari tahap perencanaan dan pengambilan keputusan (Lubis, 2009).

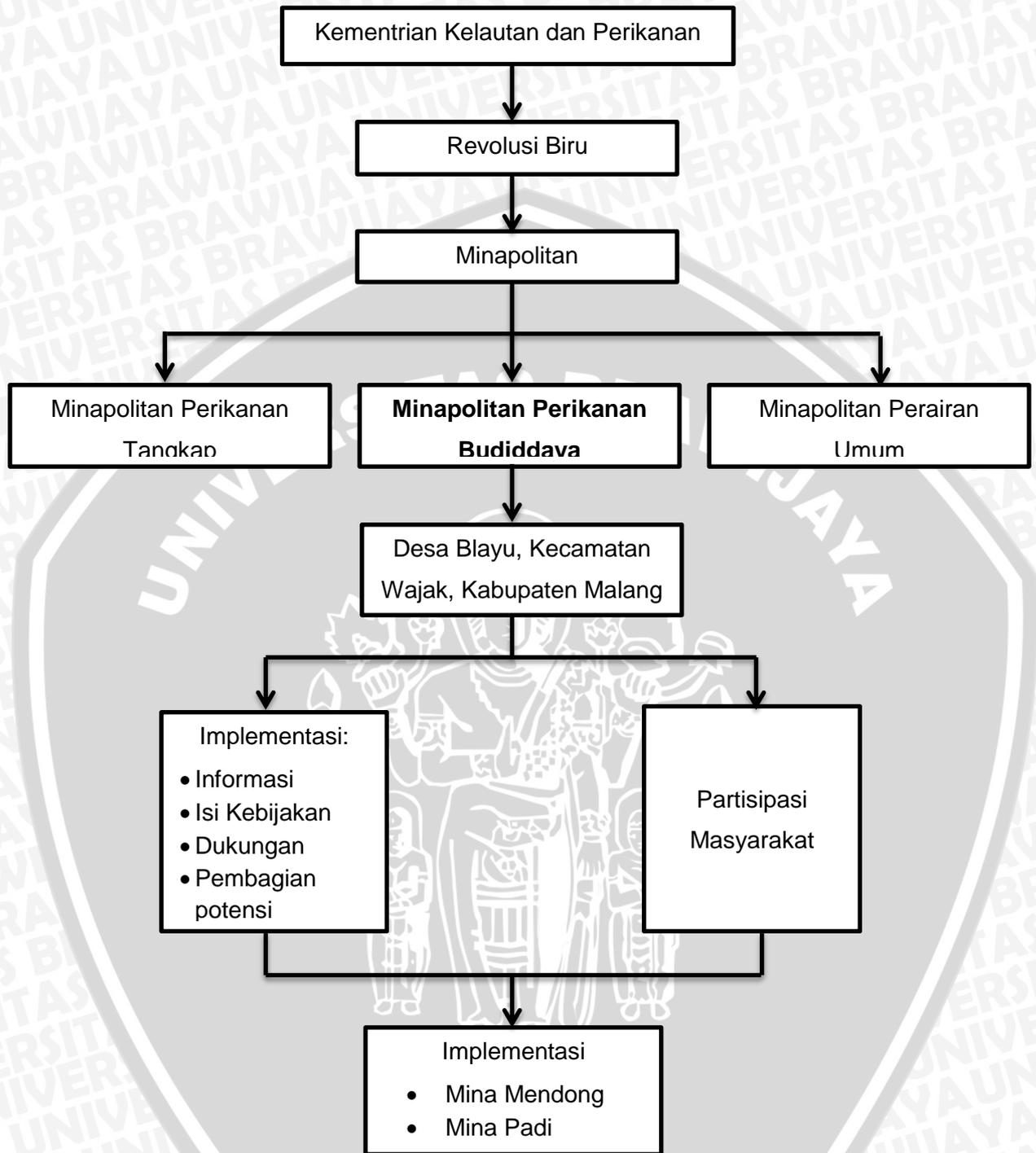
## 2.6 Kerangka Berfikir

Pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan dan memaksimalkan produksi perikanan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat revolusi biru, dimana revolusi biru ini bertujuan untuk mengubah cara berfikir masyarakat yang awalya lebih banyak memanfaatkan hasil daratan, dan sekarang masyarakat juga dapat memperbanyak pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan revolusi biru adalah dengan program minapolitan. Program minapolitan terdiri dari minapolitan perikanan tangkap, minapolitan perikanan budidaya, dan minapolitan perairan umum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2011 yang berisikan tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan minapolitan, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan dengan Kecamatan Wajak yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan budidaya dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap. Dalam penelitian ini mengambil Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang sebagai obyek penelitian karena di Desa Blayu program minapolitan dijalankan dengan sistem minapadi dan mina mendong.

Penelitian ini memfokuskan pada kesesuaian implementasi program minapolitan dengan mengetahui pelaksanaan program minapolitan yang dilihat dari 4 faktor yang terdiri dari informasi, isi kebijakan, dukungan, dan pembagian potensi, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program minapolitan sehingga pelaksanaan program minapolitan dapat terus ditingkatkan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 – Maret 2015.

#### 3.2 Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah petani mina mendong dan petani mina padi di Desa Blayu, Sekretariat Balai Desa Blayu, Badan Penyuluh Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Bidang Perikanan Budidaya sebagai informan untuk melengkapi data yang diperlukan dan akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### 3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik studi kasus. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat pada suatu fenomena. Metode deskripsi bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi pada daerah tertentu (Suryana, 2010). Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki tentang fenomena di dalam konteks kehidupan nyata apabila batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2013). Penelitian ini mencoba mencari informasi dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi, seperti diantaranya mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program

Minapolitan, serta untuk mengetahui proses-proses yang terjadi selama Program Minapolitan dilaksanakan.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti harus ngumpulkan data-data secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain dengan melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuisisioner (Aedi, 2010). Pada penelitian ini data primer yang diambil dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Data Primer

No	Data	Metode
1.	Sarana Prasarana sistem mina padi dan mina mendong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dengan petani minapadi dan mina mendong</li> <li>• Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan bidang Perikanan Budidaya</li> <li>• Observasi sarana prasarana mina padi dan mina mendong</li> </ul>
2.	Proses penyuluhan dan pengarahan pelaksanaan Program Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dengan petani minapadi dan mina mendong</li> <li>• Wawancara dengan Badan Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan bidang Perikanan Budidaya</li> <li>• Wawancara dengan staff Balai Desa Blayu yang bertanggung jawab terhadap program minapolitan</li> <li>• Observasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan</li> </ul>
3.	Informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dengan petani minapadi dan mina mendong</li> <li>• Wawancara dengan Badan Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Wawancara dengan staff Balai Desa Blayu yang bertanggung jawab terhadap program minapolitan</li> <li>• Observasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan</li> </ul>
4.	Informasi tentang faktor penghambat dan faktor pendukung Program Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dengan petani minapadi dan mina mendong</li> <li>• Wawancara dengan Badan Penyuluh Pertanian</li> <li>• Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Bidang Perikanan Budidaya</li> <li>• Wawancara dengan staff Balai Desa Blayu yang bertanggung jawab terhadap Program Minapolitan</li> </ul>
5.	Informasi cara penyelesaian kendala-kendala dalam Program Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dengan petani minapadi dan mina mendong</li> <li>• Wawancara dengan Badan Penyuluh Pertanian</li> <li>• Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Bidang Perikanan Budidaya</li> <li>• Wawancara dengan staff Balai Desa Blayu yang bertanggung jawab terhadap Program Minapolitan</li> </ul>

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dimana peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh peneliti dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Aedi, 2010). Pada penelitian ini data sekunder yang diambil dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Data Sekunder**

No.	Data	Metode
1.	Data kependudukan Desa Blayu	Pengumpulan data arsip dari Balai Desa Blayu
2.	Data petani Mina Mendong dan Mina Padi di Desa Blayu	Pengumpulan data arsip dari Badan Penyuluh Pertanian
3.	SK Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tentang Minapolitan	Pengumpulan data arsip dari Dinas Kelautan dan Perikanan
4.	Laporan tahunan dari tim pengawas pelaksanaan Program Minapolitan	Pengambilan data dari laporan tahunan pemerintah dan tim pengawas

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden dalam jumlah kecil (Riduwan, 2003). Observasi dapat digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya dan keahliannya. Teknik observasi sangat mengandalkan pengamatan dan ingatan dari si peneliti (Usman dan Akbar, 2006). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan Program Minapolitan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Minapolitan.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mendapatkan informasi dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi pada teknik wawancara adalah pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara (Riduwan, 2003). Wawancara yang sudah dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara secara langsung yang dilakukan dengan masyarakat Desa Blayu, Staff Balai Desa Blayu, Badan Penyuluh Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui pelaksanaan program, partisipasi semua pihak, serta faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Program Minapolitan.

Kuisisioner adalah pernyataan atau pertanyaan yang diajukan kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara). Terdapat dua jenis kuisisioner, yaitu kuisisioner tertutup yang memiliki pertanyaan dengan bentuk ya atau tidak, pelihan ganda, skala penilaian, dan daftar cek, serta kuisisioner terbuka yang memiliki bentuk jawaban singkat atau uraian singkat dalam bentuk isian (Usman dan Akbar, 2006). Pada penelitian ini teknik kuisisioner yang adalah kuisisioner tertutup. Kuisisioner digunakan untuk mengetahui data yang bersifat spesifik dari masing-masing responden seperti nama, umur, alasan berpartisipasi dalam program, dan jenis ikan yang dibudidaya.

### 3.5.3 Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ada. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik

dokumentasi cenderung merupakan data-data sekunder. Keuntungan yang didapat dari teknik dokumentasi adalah biayanya yang relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Kekurangan dari teknik dokumentasi adalah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada kesalahan cetak maka peneliti ikut mengalami kesalahan dalam mengambil data (Usman dan Akbar, 2006). Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kelompok Ngudi Mulyo III tentang jumlah anggota kelompok dan kegiatan kelompok. Selain itu juga dilakukan pengumpulan arsip-arsip dari Kantor Desa Blayu, Kantor Kecamatan Wajak, dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mengenai program minapolitan.

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian karena studi pustaka pada dasarnya adalah suatu upaya umum yang harus dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Studi pustaka merupakan proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian (Sittaningsih, 2014). Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur dari internet, laporan tahunan dari dinas yang terkait dalam pelaksanaan program minapolitan di Desa Blayu.

### **3.6 Metode dan Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Usman dan Akbar (2006), teknik sampling adalah teknik tertentu yang digunakan untuk pengambilan sampel. Teknik sampling berguna agar mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasi sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan, lebih teliti

menghitung yang sedikit daripada yang banyak, dan agar menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Teknik *purposive sampling* digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Menurut Supranto (2000), teknik sensus adalah cara pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan satu-persatu pada seluruh elemen populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel pada dinas-dinas terkait dalam Program Minapolitan di Desa Blayu karena sampel yang diambil merupakan orang-orang yang ahli di bidang minapolitan, khususnya pada Program Minapolitan di Kabupaten Malang. Selain itu juga menggunakan teknik sensus untuk pengambilan sampel pada petani mina padi dan mina mendong. Kelompok sampel dan jumlah populasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kelompok Sampel dalam Penelitian**

KELOMPOK	KEY INFORMAN	JUMLAH
INSTANSI PEMERINTAH	Dinas Kelautan dan Perikanan	2
	Badan Penyuluh Pertanian	1
	Balai Desa Blayu	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>
PETANI	Petani Mina Mendong	19
	Petani Mina Padi	4
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>
<b>Total</b>		<b>27</b>

### 3.7 Analisis Data

Analisa data terdiri dari pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian. Tiga teknik analisis yang menentukan dan dapat digunakan dalam analisis data adalah penjadohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu (Yin, 2013). Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Fokus penelitian dan analisis data dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Analisa Data**

Fokus Penelitian	Analisa Data
<p>Implementasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi</li> <li>• Isi kebijakan</li> <li>• Dukungan</li> <li>• Pembagian Potensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyatuan pemahaman antara pemberi informasi dengan penerima informasi</li> <li>• Sistem penyampaian informasi</li> <li>• Keefektifitasan peyampaian informasi</li> <li>• Kejelasan isi dan tujuan dari kebijakan</li> <li>• Kesesuaian isi kebijakan dengan sumberdaya yang ada dan kepentingan masyarakat</li> <li>• Dukungan masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, pelaporan maupun evaluasi program</li> <li>• Sistem pembagaian tugas dalam pelaksanaan program</li> <li>• Koordinasi masing-masing bagian dalam pelaksanaan program</li> </ul>
<p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi Pemerintah</li> <li>• Partisipasi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pendukung pelaksanaan Program Minapolitan</li> <li>• Program-program pendukung yang telah terealisasi</li> <li>• Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan Program Minapolitan</li> </ul>
<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program</li> <li>• Faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program</li> </ul>

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Keadaan Umum

#### 4.1.1 Letak Geografis Dan Topografis

Profil Kecamatan Wajak (2015) menunjukkan bahwa kecamatan Wajak secara geografis terletak antara 112°42'18" sampai 112°48'00" Bujur Timur dan 8°04'25" sampai 8°09'56" Lintang Selatan. Kecamatan Wajak merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang terletak dibagian Timur Kabupaten Malang dan merupakan pusat pengembangan kawasan Malang Timur yang memiliki luas wilayah sekitar 9.785,33 Ha dengan batas-batas wilayah:

Utara : Kecamatan Poncokusumo

Timur : Kecamatan Tirtoyudo

Barat : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Bululawang

Selatan : Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit

Lokasi penelitian Skripsi ini terletak di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berdasarkan profil Desa Blayu (2009), diketahui bahwa Desa Blayu memiliki luas wilayah sekitar 218,50 Ha dengan luas dataran 131,1 Ha dan luas perbukitan atau pegunungan 87,4 Ha. Wilayah Desa Blayu secara umum digunakan sebagai wilayah pemukiman, sawah, ladang, kolam lapangan, serta perkantoran. Tingkat kesuburan tanah di Desa Blayu sangat beragam, 8,14% tanah di Desa Blayu sangat subur, 39,75% tanah di Desa Blayu subur, 38,51% tanah di Desa Blayu pada tingkat kesuburan sedang dan 13,48% tanah di Desa Blayu tidak subur. Desa Blayu berada pada ketinggian 550 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan antara 1297-1925 mm/tahun dan suhu rata-rata sebesar 20°C-32°C. Batas-batas Desa Blayu adalah sebagai berikut:

Utara : Desa Wajak

Selatan : Desa Codo

Timur : Desa Patokpecis

Barat : Desa Sukolilo

#### 4.1.2 Keadaan Umum Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang ada di Desa Blayu pada tahun 2009, jumlah penduduk Desa Blayu sebanyak 6.678 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.349 jiwa atau 50,15% dari jumlah penduduk secara keseluruhan dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.329 jiwa atau 49,85% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Usia penduduk di Desa Blayu antara 0 sampai  $\geq 59$  tahun. Data penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Data Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	0 Bulan – 5 Tahun	653	9,77
2	6 – 15 Tahun	1.068	15,98
3	16 – 25 Tahun	1.080	16,16
4	26 – 35 Tahun	1.048	15,68
5	36 – 45 Tahun	1.064	15,92
6	46 – 55 Tahun	1.054	15,77
7	$\geq 56$ Tahun	716	10,71
Total		<b>6.683</b>	<b>100</b>

Sumber: Monografi Desa Blayu, 2009

Dari Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Blayu mayoritas berumur 6-55 Tahun dengan persentase sebesar 79,51% dari total data penduduk berdasarkan usia. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Blayu sebagian besar adalah anak-anak dan penduduk yang berumur produktif.

Jumlah angkatan kerja Di Desa Blayu terdiri dari jumlah angkatan kerja yang tidak tamat SD/Sederajat, tamat SMP/Sederajat, tamat

SMA/Sederajat, tamat diploma dan taman perguruan tinggi. Data jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Jumlah Angkatan Kerja**

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Angkatan kerja tidak lulus SD/ Sederajat	349	17,42
2.	Angkatan kerja tamat SMP/ Sederajat	767	38,30
3.	Angkatan kerja tamat SMA/ Sederajat	859	42,89
4.	Angkatan kerja tamat Diploma	8	0,40
5.	Angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi	20	0,99
<b>Total</b>		<b>2.003</b>	<b>100</b>

Sumber: Monografi Desa Blayu, 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai tahun 2009 mayoritas angkatan kerja penduduk Desa Blayu merupakan angkatan kerja tamat SMA/Sederajat dengan 42,89% dengan jumlah penduduk angkatan kerja usia 15-55 tahun sebanyak 3.064 orang dan jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja sebanyak 612 orang.

Mata pencaharian penduduk Desa Blayu terdiri dari berbagai macam profesi. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petani	860	62,04
2.	Jasa/ Perdagangan	240	17,31
3.	Industri	124	8,94
4.	Pegawai Desa	11	0,79
5.	Pegawai Negri Sipil	36	2,60
6.	Pensiunan ABRI	4	0,29
7.	Pegawai BUMN/BUMD	1	0,07
8.	Jasa Lembaga Keuangan	5	0,36
9.	Jasa Angkutan dan Transportasi	43	3,10
10.	Jasa Hiburan	3	0,22
11.	Tukang Kayu	21	1,51
12.	Tukang Batu	26	1,88
13.	Tukang Jahit	12	0,87
	Total	<b>1.386</b>	<b>100</b>

Sumber: Monografi Desa Blayu, 2009

Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai tahun 2009 mayoritas penduduk di Desa Blayu bekerja sebagai petani dengan persentase sebesar 62.04%. Hal ini didukung dengan luas sawah yang ada di Desa Blayu mencapai 157,5 Ha dengan tingkat kesuburan tanah sebesar 86,4% dari keseluruhan luas tanah di Desa Blayu terdiri dari tanah yang sangat subur hingga tanah dengan tingkat kesuburan sedang.

#### 4.1.3 Keadaan Perikanan

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar. Cabang-cabang usaha perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Malang meliputi usaha penangkapan ikan di laut, usaha penangkapan ikan dan *restocking* di perairan umum, usaha budidaya ikan berupa ikan kolam, keramba, min padi, kolam pembenihan ikan (KPI) dan tambak udang windu, serta usaha perikanan di bidang pasca panen yaitu pengolahan ikan. Jenis ikan yang berpotensi adalah perikanan kolam dan

perikanan sungai meskipun luas lahan yang digunakan relatif kecil (Pemerintah Kabupaten Malang, 2009). Jumlah produksi dari beberapa komoditas hasil budidaya di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Produksi Kabupaten Malang Per Komoditas (2011 - 2013)**

No.	Komoditas	Produksi (ton)		
		2011	2012	2013
1.	Nila	6.573,75	9.006,07	9.935,90
2.	Lele	4.127,56	4.838,31	5.564,06
3.	Mas	579,33	574,21	487,36
4.	Gurami	6,40	8,78	11,17
5.	Patin	5,25	5,55	6,67
6.	Bandeng	65,00	65,25	74,90
7.	Vaname	873,70	875,00	982,00
8.	Lainnya	6,50	7,58	8,10
<b>Total</b>		<b>12.237,39</b>	<b>15.380,75</b>	<b>17.070,16</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang (2014)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa komoditas yang memiliki hasil produksi paling banyak adalah ikan nila dengan hasil produksi pada tahun 2011 sebanyak 6.573,75 ton, pada tahun 2012 sebanyak 9.006,07 ton, dan pada tahun 2013 sebanyak 9.935,90, sehingga ikan nila ditentukan komoditas unggulan di Kabupaten Malang. Hasil produksi perikanan di Kabupaten Malang dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan, kecuali ikan mas yang mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2013.

Sebagai daerah *hiterland* dalam Program Minapolitan, Desa Blayu memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari profil Desa Blayu (2009) menunjukkan bahwa komoditi perikanan yang utama di Desa Blayu adalah ikan mujair, ikan bandeng, dan beberapa jenis ikan lainnya dengan total hasil tangkapan 15 ton/tahun. Selain itu, perikanan di Desa Blayu juga didukung dengan adanya 10 buah mata air yang tersebar di beberapa daerah di Desa Blayu dan terdapat 4 sungai. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kecamatan Wajak sampai tahun 2012, sejak diresmikan sebagai daerah

*hiterland* dalam Program Minapolitan, hasil budidaya ikan di Desa Blayu menjadi 500 ton/tahun.

## 4.2 Program Minapolitan

### 4.2.1 Penetapan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan penetapan kawasan minapolitan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Syarat yang ditetapkan antara lain:

- Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi. Komoditas unggulan di Desa Blayu adalah ikan nila, dengan komoditas pendukung lainnya adalah ikan tombro dan ikan mujaer. sebagian besar petani mina mendong dan mina padi di Desa Blayu membudidayakan ketiga komoditas tersebut.
- Letak geografis kawasan yang strategis dan kawasan yang secara alami cocok untuk usaha perikanan. Jarak antara Desa Blayu dengan Pasar Wajak yang berada di Desa Wajak kurang lebih 2 Km. Desa Blayu secara alami cocok digunakan sebagai kawasan perikanan karena di Desa Blayu masih banyak sawah mendong yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan. Selain itu, Desa Blayu memiliki air yang melimpah, sehingga dapat memudahkan petani dalam membudidayakan ikan dan bertani.
- Terdapat sistem mata rantai produksi perikanan budidaya yang terdiri dari ketersediaan lahan, fasilitas pengairan, ketersediaan benih, keterlibatan pembudidaya dan para pekerja setempat, sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik. Desa Blayu masih memiliki banyak sawah mendong yang dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan. Pada tahun 2009

luas lahan di Desa Blayu yang digunakan sebagai sawah sebesar 157,5 Ha dan luas lahan yang digunakan sebagai kolam budidaya ikan seluas 1,5 Ha. Selain itu Desa Blayu memiliki sumber daya air yang melimpah sehingga dimana Desa Blayu memiliki 10 mata air. Petani mudah mendapatkan benih ikan karena kelompok tani di Desa Blayu menyediakan benih ikan yang dapat dibeli semua petani mina mendong dan mina padi di Desa Blayu maupun pembudidaya dari daerah lain.

- Tersedianya fasilitas pendukung meliputi permodalan, lembaga pemerintah daerah pembina, lembaga usaha, penyuluh dan pelatihan. Tersedianya fasilitas pendukung yang terdiri dari fasilitas permodalan dari Bank nasional dan beberapa koperasi di Kecamatan Wajak, serta adanya Balai Penyuluh Pertanian yang mendampingi masyarakat dalam berbudidaya ikan dan bertani.

#### 4.2.2 Informasi

Pelaksanaan suatu program diperlukan suatu sosialisasi tentang program yang akan dijalankan kepada objek dari program itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi diharapkan objek dari program tersebut dapat lebih memahami isi dari program tersebut dan mau ikut dalam pelaksanaan program tersebut. Sistem penyampaian informasi yang benar akan membantu dalam penyatuan pemahaman antara pemberi informasi dengan penerima informasi. Namun tidak semua objek program langsung menyetujui untuk ikut dalam pelaksanaan program tersebut sehingga sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan satu kali saja melainkan beberapa kali dengan melakukan berbagai macam pendekatan dan pendampingan agar objek program dapat lebih memahami dan mengerti pelaksanaan program tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Jan Merse *dalam* Koryati *et all* (2004) yang berisikan tentang informasi bisa menjadi salah

satu faktor penyebab kegagalan dalam implementasi, karena informasi diperlukan sebagai sarana penyatuan pemahaman, visi dan misi kebijakan yang telah dirumuskan.

Proses penyampaian informasi Program Minapolitan di Desa Blayu dilakukan dengan menggunakan pendekatan individu dan kelompok. Penyatuan pemahaman antara penyuluh dengan warga dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Penyuluh mengajak petani untuk menghitung keuntungan yang didapat dari mengikuti sistem mina mendong dan mina padi, serta membuat demplot. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Wiwin, salah satu penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian.

*“Program Minapolitan ini sudah kita sosialisasikan yang jelas lewat penyuluhan dan pertemuan kelompok tani. Selain pendekatan secara individu, kita pendekatan ke kelompok-kelompok masyarakat yang punya potensi. Jadi bisa lewat jamaah tahlil, lewat forum-forum yang ada di masyarakat. Memang awal kita susah untuk mencari orang, jadi pertama kita membuat demplot dulu. Jadi ada individu petani yang mau kita ajak untuk percobaan, baru kita ajak beberapa orang berkumpul untuk diskusi tentang keuntungan dan kekurangan mina padi dan mina mendong, kemudin kita ajak untuk hitung-hitungan analisa usaha mendong berapa, mina mendong berapa, dan ikan saja berapa. Itu kita hitung-hitungan realnya, jadi waktu panen kalau misalnya harga mendong pas turun dan dengan adanya ikan mereka tidak rugi. Memang waktu awal agak susah tetapi setelah ada demplot seperti itu, mereka baru minat. Penyatuan pemahaman kepada petani memang tidak dipaksakan. Memang harapan kita adalah suatu hamparan, tapi untuk petani yang belum setuju, kita mengadakan program bantuan benih dan pakan supaya mereka minat, karena untuk mengawali mungkin mereka tidak ada modal. Jadi dari dinas kita mengajukan bantuan benih dan pakan di mendong. Jadi waktu itu kita buat kawasan, di semua petani di kawasan itu kita beri bantuan benih. Selain itu juga ada bantuan pengembangan, jadi petani yang belum pernah mendapat bantuan, mau memelihara ikan dan belum memiliki modal maka kita beri bantuan benih, bantuan kolam.”*

Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mujib, salah satu staff Balai Desa Blayu.

*“untuk sosialisai ke masyarakat mengenai perikanan ini masih kurang karena yang mempunyai lokasi ini masih orang-orang yang kuno atau orang-orang tua sehingga sulit untuk menyatukan pemahaman dengan mereka.”*

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa penyampaian informasi di Desa Blayu memang mengalami kesulitan, namun pemerintah tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan contoh dan bantuan-bantuan kepada masyarakat agar masyarakat yang awalnya tidak tertarik untuk mengikuti program menjadi tertarik dan mau mengikuti Program Minapolitan dengan menggunakan sistem mina mendong dan mina padi. Informasi yang disampaikan kepada petani adalah gambaran mengenai sistem mina mendong dan mina padi yang akan dijalankan oleh petani, penyuluhan mengenai sistem budidaya ikan, cara memanen dan menyeleksi ikan, sistem pengembangan usaha, dan cara pembuatan pakan secara mandiri. dengan memberikan gambaran mengenai sistem mina mendong dan sistem mina padi, diharapkan petani lebih memahami dan tertarik untuk mengikuti Program Minapolitan di Desa Blayu.

#### **4.2.3 Isi dan Capaian Program**

##### **A. Isi Program**

Berdasarkan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang (2009), kegiatan untuk pengembangan kawasan minapolitan antara lain:

1. Pengembangan budidaya

Pengembangan budidaya ikan Nila dan ikan komplementernya, diidentifikasi menurut volume fisik yang jelas. Garis besar kegiatannya meliputi persiapan lahan dan penyiapan budidaya ikan, pelatihan usaha budidaya ikan, penyediaan mina input dan alat perikanan untuk budidaya, dan penyelenggaraan penyuluhan, terutama dilaksanakan oleh program yang dibiayai APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten. Pembinaan teknis meliputi budidaya, cara memanen dan cara untuk mempertahankan kualitas produk, perluasan pasca panen.

## 2. Pembinaan pasca panen dan pemasaran

Peningkatan keterampilan teknis dalam penanganan pasca panen seperti cara memanen, mengupulkan dan menyeleksi hasil panen serta peralatan yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hingga cara pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kemampuan pemasaran, khususnya yang menyangkut produk ikan hasil budidaya. Untuk melaksanakan pembinaan dengan sarana yang tersedia di wilayah secara lebih optimal maka kerjasama dengan instansi perindustrian dan perdagangan setempat harus dilakukan. Sinergi kegiatan dapat dicapai dengan koordinasi perencanaan dan pembagian tugas yang jelas.

## 3. Pembinaan pengembangan usaha perikanan

Kelompok kegiatan yang menyangkut peningkatan kemampuan mengelola usaha dan melaksanakan kemitraan dengan pedagang, eksportir maupun industri pengolahan pangan dilaksanakan melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ke arah terbentuknya koperasi pembudidayaan ikan nila, pembentukan Forum Komunikasi Minabisnis (FORKAM), pelaksanaan temu-temu usaha, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan penyuluh perikanan sebagai pusat konsultasi dan pelayanan minabisnis.

## 4. Kegiatan penunjang

### a. Pelayanan Sarana Produksi

Lembaga pelayanan ini (misalnya PMU dan KUD) diperlukan untuk membantu penyediaan sarana produksi dan peralatan yang dibutuhkan para pembudidaya ikan, pedagang dan pengolah untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Pelayanan ini harus ada untuk menjamin ketersediaan sarana usaha budidaya ikan tepat waktu, jumlah dan harga yang wajar. Instansi pemerintah setempat harus mampu menciptakan iklim usaha dan memberikan dukungan agar koperasi atau pengusaha

dapat menjalankan fungsinya secara wajar. Diperlukannya rekomendasi berbagai program insentif untuk mendorong tumbuhnya lembaga pelayanan, khususnya untuk lokasi yang terpencil.

b. Pelayanan Informasi Teknologi Spesifik Lokasi

Diidentifikasi jenis teknologi spesifik yang diperlukan untuk pembangunan sentra minabisnis. Pelayanan ini mencakup pemilihan kultivar dengan kualitas tinggi yang secara ekonomis dapat diproduksi di lokasi setempat, teknologi pembenihan, teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan primer, sekunder hingga pengepakan ikan segar maupun olahannya. Kerjasama peneliti-penyuluh dalam hal alih teknologi kepada pembudidaya harus dilakukan secara intensif.

c. Pelayanan Perlindungan Ikan

Kegiatan perlindungan yang harus mengawasi pelaksanaan sentra minabisnis terutama adalah pengawasan sebagai tindak preventif serta metode penanggulangan hama dan penyakit yang mungkin mengganggu ikan, serta komoditas penunjangnya. Hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian akibat kegagalan panen atau penurunan kualitas produk.

d. Pelayanan Pembenihan

Penangkar benih mengalokasikan kegiatan untuk mendukung pengembangan komoditas ikan nila maupun komoditi penunjangnya (jika ada), pada wilayah sentra minabisnis. Kegiatan yang diperlukan beragam dan dirinci menurut volume dan jenis. Aspek ini mencakup pengadaan benih, pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembinaan pembudidaya penangkar benih, khususnya untuk ikan unggulan serta komoditas penunjang.

e. Pembinaan Penyuluhan

BPP ditingkatkan kemampuannya agar dapat memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya, sebagai tempat bertanya, berlatih, berbagi pengalaman antar pembudidaya dan tempat pertemuan antara pembudidaya, pedagang dan pengelola minaindustri. Untuk itu perlu persiapan sumberdaya manusia (SDM) serta perangkat keras dan lunak yang memadai untuk menjalankan fungsi pusat pelayanan minabisnis.

f. Pengairan

Sentra minabisnis memerlukan air untuk budidaya, pasca panen, dan kegiatan penunjang lainnya. Kebutuhan air bersih akan meningkat kalau telah terdapat kegiatan pengolahan, terutama dalam bentuk industri pengolahan pangan ikani. Program pengairan yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum diminta untuk mengalokasikan kegiatan penyediaan sumber air dan saluran pengairan untuk kawasan sentra ini. Koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait sangat penting untuk mengarahkan kegiatan fisik yang tepat pada lokasi yang tepat pula.

g. Transportasi

Sarana transportasi sangat vital dalam membangun sentra minabisnis, dengan demikian program pembangunan sarana transportasi yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan harus mampu menjamin tersedianya prasarana jalan (jalan desa dan jalan ke lokasi budidaya) serta fasilitas transportasi yang memadai di kawasan sentra produksi, yang menghubungkannya dengan pusat-pusat pelayanan dan pemasaran.

h. Energi

Energi diperlukan antara lain dalam proses penanganan pasca panen terutama untuk alat pengeringan, pengupasan, sortasi, pengolahan,

perlakuan pemanasan, pendinginan dan sebagainya. Energi yang dibutuhkan dapat berupa listrik, bahan bakar minyak, dan gas.

i. Sarana dan Prasarana Pemasaran

Sarana dan prasarana pemasaran, seperti tempat penampungan, alat-alat penyimpanan dengan fasilitas pendingin, alat-alat pengepakan, informasi harga serta fasilitas fisik pasar yang memadai, sangat vital dalam pengembangan sentra minabisnis ikan nila. Kebutuhan fasilitas ini sangat beragam sesuai dengan kondisi wilayah dan tersedianya prasarana penunjang.

j. Lembaga Keuangan/Permodalan

Tersedianya lembaga keuangan dan permodalan sangat penting bagi para pelaku usaha minabisnis ikan nila, sehingga harus diusahakan di lokasi sentra atau lokasi yang sangat mudah dicapai dari kawasan sentra, dengan biaya transportasi dan biaya administrasi yang minimum. Kerjasama antara Pemda dengan instansi terkait diperlukan untuk menyediakan sumber modal yang dapat diakses dengan prosedur yang cepat dan murah.

## **B. Capaian Program**

Kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang telah dijabarkan dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang (2009). Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan telah terlaksana dengan baik. Pencapaian kegiatan sampai tahun 2014 untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain:

### 1. Pengembangan budidaya

Komoditi utama yang dibudidayakan di Desa Blayu adalah ikan nila karena komoditi utama yang dikembangkan dalam Program Minapolitan di Kecamatan Wajak adalah ikan nila. Jenis komoditi lain yang banyak dibudidayakan petani mina mendong dan mina padi di Desa Blayu adalah ikan tombro dan ikan mujaer. Pengembangan budidaya di Desa Blayu didukung pemerintah dengan menyediakan kolam yang dapat digunakan sebagai tempat ikan hidup, serta lahan mina mendong yang digunakan sebagai demo plot. Pemerintah juga menyediakan 14.170 benih ikan nila yang dibagikan kepada petani sebagai modal awal dalam membudidayakan ikan nila. Namun pembagaaian benih ikan nila belum bisa merata kepada seluruh petani di Desa Blayu karena masih ada petani yang belum pernah mendapatkan bantuan benih sehingga petani membudidayakan ikan dengan menggunakan benih yang dibeli dari pembudidaya lain. Pemerintah Kabupaten Malang juga bekerjasama dengan Balai Penyuluh Pertanian untuk memberikan penyuluhan mengenai budidaya ikan. Penyuluhan ini dilakukan sebanyak 7 kali.

### 2. Pembinaan pasca panen dan pemasaran

Kegiatan pembinaan pasca panen dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perikanan yang dihasilkan. Pembinaan pasca panen yang dilakukan mulai dari cara memanen, mengumpulkan dan menyeleksi hasil panen yang memenuhi standar permintaan konsumen. Pembinaan untuk pengolahan produk dibutuhkan karena dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk. Sampai saat ini belum ada pelatihan untuk pengolahan hasil perikanan, sehingga petani menjual hasil budidaya mereka dalam bentuk ikan hidup atau ikan mati.

### 3. Pembinaan pengembangan usaha perikanan

Pembinaan pengembangan usaha perikanan di Desa Blayu dilakukan dengan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada Kelompok Ngudi Mulyo III. Didalam kelompok, petani dibina agar bisa menjadi wirausaha, khususnya wirausaha dalam berbudidaya ikan.

### 4. Kegiatan penunjang

#### a. Pelayanan sarana produksi

Pemerintah telah menyediakan sarana dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung Program Minapolitan di Desa Blayu. Sarana yang disediakan pemerintah adalah kolam yang digunakan sebagai tempat membudidayakan ikan serta lahan mina mendong yang digunakan sebagai demo plot. Selain itu pemerintah juga menyediakan mesin pembuat pakan ikan yang diberikan kepada kelompok Ngudi Mulyo III. Namun mesin pembuat pakan ikan tidak dimanfaatkan oleh petani karena petani merasa kualitas pakan ikan yang diproduksi secara mandiri tidak sebagus kualitas pakan ikan buatan pabrik. Karena selisih harga pakan ikan buatan sendiri dan pakan ikan buatan pabrik hanya sebesar Rp 600,- maka petani memilih membeli pakan ikan buatan pabrik.

#### b. Pelayanan informasi teknologi spesifik lokasi

Teknologi pembenihan, budidaya, pasca panen dan cara pembuatan pakan ikan telah disampaikan kepada petani pada saat ada penyuluhan di awal program, namun kualitas pakan ikan buatan petani masih belum bisa sebagus pakan ikan buatan pabrik sehingga dibutuhkan pelatihan dalam pembuatan pakan ikan agar pakan ikan buatan petani bisa sebagus pakan ikan buatan pabrik. Informasi tidak hanya saat

penyuluhan saja, tetapi penyuluh dan ketua kelompok Ngudi Mulyo III terus memberikan informasi-informasi terbaru.

c. Pelayanan perlindungan ikan

Kegiatan pencegahan yang dilakukan agar ikan di Desa Blayu tidak terkena virus dan hama adalah dengan tidak mendatangkan benih ikan dari luar Malang, khususnya dari daerah Blitar dan Tulungagung. Dilakukan vaksinasi terhadap benih-benih ikan untuk mencegah adanya virus dan hama. Di dalam kelompok Ngudi Mulyo III juga ada seorang pembudidaya ikan yang mengerti mengenai penyakit-penyakit ikan, sehingga memudahkan kelompok untuk mendeteksi penyakit ikan yang ada di Desa Blayu. Kegiatan pencegahan penyakit ikan yang dilakukan beberapa petani mina mendong dan mina padi adalah dengan memberi air perasan daun pepaya pada sawah mendong dan sawah padi mereka.

d. Pelayanan pembenihan

Pengadaan benih ikan di Desa Blayu tidak mengalami kesulitan, karena BPP, kelompok Ngudi Mulyo III dan beberapa pembudidaya ikan menyediakan benih ikan yang dapat dibeli oleh petani yang berasal dari Desa Blayu maupun petani dari daerah lain. Selain itu, untuk petani yang ingin membudidaya ikan tetapi tidak memiliki modal, BPP dan kelompok Ngudi Mulyo III memfasilitasi petani untuk meminta bantuan benih ikan nila kepada DKP.

e. Pembinaan penyuluhan

Adanya BPP di Kecamatan Wajak membantu petani dalam membudidayakan ikan. DKP Kab. Malang bekerja sama dengan BPP untuk melakukan penyuluhan kepada petani. Saat para petani mengalami hambatan dalam budidaya ikan dan kelompok tidak dapat

memberikan solusi, maka BPP yang akan berusaha mencari solusi yang tepat.

f. Pengairan

Sistem pengairan di Desa Blayu tidak menjadi suatu hambatan dalam membudidayakan ikan. Pembangunan beberapa DAM di Desa Blayu dan saluran air sangat membantu proses budidaya ikan karena DAM di Desa Blayu sudah tidak mudah rusak. Namun masih ada beberapa DAM yang belum dibangun secara permanen.

g. Transportasi

Perbaikan prasarana transportasi (jalan-jalan desa) diperlukan untuk menunjang pembangunan sentra minabisnis. Di Desa Blayu dilakukan perbaikan sepanjang jl. Pijetan dan jl. Bebekan yang masih dalam kondisi berbatu dan dilakukan pembangunan sepanjang jl. Bebekan yang masih dalam kondisi tanah. Namun masih ada beberapa jalan yang masih dalam keadaan berbatu dan bertanah sehingga perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut agar seluruh jalan di Desa Blayu bisa layak digunakan.

h. Energi

Energi yang dibutuhkan dalam budidaya ikan berupa bahan bakar minyak yang digunakan pada mesin pembuat pakan ikan. Namun mesin pembuat pakan ikan ini tidak dimanfaatkan secara maksimal dan sudah tidak digunakan lagi oleh petani mina mendong dan mina padi di Desa Blayu.

i. Sarana dan prasarana pemasaran

Sistem pemasaran yang dilakukan petani di Desa Blayu adalah dengan memancingkan hasil budidaya mereka dan menjual kepada konsumen yang datang langsung ke Desa Blayu. Sistem pemasaran yang ada di

kelompok Ngudi Mulyo III adalah dengan menggabungkan hasil budidaya dari anggota kelompok yang kemudian dijual kepada konsumen yang sudah memesan ikan hasil budidaya mereka. Selama ini pembeli datang sendiri ke Desa Blayu untuk membeli ikan dan petani tidak melakukan pemasaran dalam bentuk apapun. Namun perbedaan harga antar desa menimbulkan persaingan harga ikan antar desa di Kecamatan Wajak, sehingga dibutuhkan penyamaan harga agar tidak terjadi persaingan harga antar petani. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan jaringan pemasaran yang ada di Desa Blayu seperti website yang berisikan informasi mengenai harga dan komoditi yang dibudidayakan di petani di Desa Blayu agar jaringan pemasaran yang telah terbentuk dapat semakin kuat dan semakin menyebar ke berbagai daerah.

j. Lembaga keuangan/Permodalan

Adanya kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta kerjasama dengan salah satu Bank Nasional sehingga di Kecamatan Wajak terdapat beberapa koperasi dan Bank yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meminjam modal usaha. Dibutuhkan pengawasan dari Pemerintah agar bunga pinjaman yang diberikan tidak memberatkan petani.

#### 4.2.4 Dukungan

Dukungan dari masyarakat menjadi menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi program, hal ini sesuai dengan yang telah dituliskan oleh Jen Merse *dalam* Koryati *et all* (2004). Masyarakat di Desa Blayu memberikan respon baik terhadap Program Minapolitan, masyarakat juga

merasa senang dengan adanya Program Minapolitan di Desa Blayu. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Mujib sebagai staff Balai Desa Blayu.

*“Respon masyarakat Blayu baik. Masyarakat senang dengan adanya Program Minapolitan. Tetapi secara sekilas masyarakat hanya senang saja, tetapi untuk melaksanakan program ini masyarakat desa isitilahnya senang dibantu. Secara umum masyarakat masih belum mandiri. Ya memang ada sebagian yang mandiri dan sisanya masih ingin dibantu. Kalau dukungan masyarakat Blayu ini siap lahan. Kalau lahan siap, tinggal sosialisasi dan bantuan dari pemerintah.”*

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan tahun 2012, peran masyarakat dalam pelaksanaan Program Minapolitan antara lain masyarakat berperan dalam pembangunan jalan-jalan yang ada di desa, masyarakat berperan dalam pembangunan kolam beton, masyarakat berperan dalam pembangunan minamendong, masyarakat berperan dalam pengadaan sarana produksi budidaya ikan, serta bantuan-bantuan lainnya. Gambar mengenai sawah petani yang digunakan bertani dengan menggunakan sistem mina padi dan mina mendong, serta kolam budidaya ikan milik petani dapat dilihat pada Lampiran 2.

#### **4.2.5 Pembagian Tugas Antar Instansi Dalam Program Minapolitan**

Mengacu dari aspek kelembagaan dan mekanisme kerjanya dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang (2009), uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur institusi dalam jaringan Minapolitan dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **A. Institusi Strategi Kebijakan**

###### **a. Departemen Kelautan dan Perikanan**

- Menyediakan fasilitas prasarana perikanan yang sesuai dengan perkembangan Minapolitan.
- Menyediakan dan menyalurkan informasi tentang prospek pasar.

- Menyediakan paket teknologi yang sesuai dengan tingkat perkembangan Minapolitan.
- Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi masyarakat desa di lokasi Minapolitan.
- Menyediakan fasilitas dan menjembatani hubungan kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis (PMU) di bawah kewenangan koordinasi DKP dengan Pengelola Minapolitan dalam memperoleh sarana produksi dan informasi teknologi budidaya lain.

b. Kantor Menteri Negara Koperasi dan PKM

- Memberikan pembinaan dan bimbingan di bidang kelembagaan dan pengelolaan usaha.
- Menyediakan fasilitas kredit untuk permodalan dan pengembangan usaha yang sesuai dengan tingkat skala usaha.
- Menyediakan fasilitas dan menghubungkan Pengelola Minapolitan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan.

**B. Institusi Strategi Operasional**

a. Pemerintah Daerah

- Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan minapolitan di wilayah kerjanya.
- Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat desa khususnya KUB-KUB, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, mental usaha, kelembagaan dan pengelolaan usaha melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga/Dinas yang berada dilingkungan Pemerintah daerah.

- Menyediakan prasarana sosial ekonomi guna mendukung operasional kegiatan pengembangan minapolitan.

b. Permodalan Nasional/INVESTOR

- Menyediakan dan menyalurkan kredit bagi kebutuhan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan yang sumber dananya dari PNM.
- Menyertakan modal investasi pada Usaha Pengembangan Minapolitan dan memberikan bimbingan manajemen usaha.
- Menyalurkan kredit bagi kebutuhan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan yang sumber dananya berasal dari Lembaga Keuangan/Perbankan.

c. Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan

- Menyediakan/menyiapkan paket teknologi tepat guna dan tekno bisnis bagi kebutuhan Usaha Pengembangan Minapolitan.
- Mengkaji perkembangan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan baik dari aspek teknis, ekonomis dan manajemen.
- Memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan.

d. Swasta

- Menyediakan, menyalurkan dan menyertakan dana investasi untuk kebutuhan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan.
- Berperan serta dalam pengelolaan Usaha Pengembangan Minapolitan pada tingkatan sampai dengan KUB dan memiliki hubungan kordinatif dengan PMU.

e. Kelompok Kerja

- Menyiapkan dan menyusun proposal (*Feasibility Study*) Usaha Pengembangan Minapolitan.

- Menyusun agenda pelaksanaan Usaha Pengembangan Minapolitan.
  - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaan Usaha Pengembangan Minapolitan.
  - Melakukan orientasi dan sosialisasi program Usaha Pengembangan Minapolitan.
  - Bersama institusi terkait mempersiapkan pembentukan suatu Badan Usaha yang berfungsi sebagai pengelola Usaha Pengembangan Minapolitan.
- f. Proyek Manajemen Unit (PMU)/Unit Pelaksana Usaha Perikanan Terpadu (UPUPT)
- Menyusun rencana pengelolaan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan.
  - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Institusi Strategi Operasional.
  - Bertanggung jawab atas kemajuan dan kesuksesan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan.
  - Menyusun rencana kegiatan bisnis di lokasi Unit Usaha atas dasar rencana pengelolaan bisnis yang telah ditetapkan.
  - Bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan LSM mengadakan pembinaan usaha kepada KUB-KUB.
  - Bertanggung jawab atas kemajuan dan kesuksesan bisnis di lokasi unit usaha.
  - Melaporkan perkembangan usaha kepada POKJA.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha KUB-KUB.

- Melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan yang ada di wilayah kerjanya dalam urusan transfer pengembalian kredit yang dikeluarkan oleh KUB-KUB.
  - Melaporkan hasil produksi dan menyetor kewajiban pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan kepada pemerintah daerah.
  - Mencarikan dan atau memfasilitasi kerjasama pemanfaatan dana CSR dari perusahaan-perusahaan Negara dan swasta yang terkena kewajiban sosial.
  - Mencarikan dana dari proyek-proyek nasional yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (P2KP, PEMP, P3DT, PPKN, APP, dll).
- g. Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- Mematuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh PMU dalam Usaha Pengembangan Minapolitan.
  - Melaporkan perkembangan usaha ke PMU/UPNPT secara rutin dan berkelanjutan.
  - Bertanggung jawab atas kemajuan dan kesuksesan usaha yang dikelola.
  - Mengembalikan kredit yang menjadi tanggung jawabnya secara tertib dan berkelanjutan.
  - Menjadi kekompakan dan keutuhan KUB.
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat
- Bersama PMU melakukan sosialisasi program Usaha Pengembangan Minapolitan di lokasi kegiatan.
  - Bersama PMU melaksanakan pembentukan KUB-KUB berdasarkan jenis usaha.

- Bersama UPNPT melakukan pembinaan dan bimbingan kepada KUB-KUB.
- Memberikan advis dan pertimbangan kepada PMU/UPUPT dalam pelaksanaan bisnis Usaha Pengembangan Minapolitan di wilayah kerja PMU/UPUPT.

### 4.3 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program

#### 4.3.1 Partisipasi Pemerintah

Program Minapolitan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya bertugas sebagai pembuat kebijakan melainkan juga sebagai pelaksanan kebijakan tersebut. Realisasi program/kegiatan perikanan budidaya di kawasan Minapolitan khususnya di Desa Blayu sampai tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Evaluasi Program Minapolitan**

No.	Ringkasan Program	Target/Indikator Kinerja	Keterangan	
			Sebelum Program	Setelah Program
1.	Pengadaan benih ikan nila untuk kelompok budidaya ikan	Terealisasinya pengadaan benih ikan nila sebanyak 14.170 benih	Pembudidaya ikan di Desa Blayu membudidayakan ikan dengan membeli benih sendiri	Petani yang ingin memulai budidaya ikan namun tidak mempunyai modal untuk membeli benih diberi bantuan benih ikan 1000 benih per orang
2.	Pengadaan induk ikan nila untuk kelompok budidaya ikan	Terealisasinya pengadaan induk ikan nila untuk kelompok budidaya nila	Kelompok tidak memiliki induk ikan nila yang bisa dibudidayakan	Pengadaan 3 pasang induk nila yang diberikan kepada kelompok Ngudi Mulyo III dengan harapan kelompok dapat terus mengembangkan usaha budidaya ikan secara mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan dari pemerintah

3.	Pelatihan budidaya ikan	Terealisasinya pelatihan budidaya ikan sebanyak 7 kali	Pembudidaya ikan di Desa Blayu berbudidaya secara otodidak tanpa ada pelatihan khusus	Pembinaan dan pelatihan teknis budidaya ikan dilakukan tim penyuluh sebanyak 7 kali
4.	Peningkatan Jl. Bebekan dan Jl. Pijetan	Terealisasinya peningkatanan Jl. Bebekan yang dalam kondisi berbatu dan jalan tanah serta Jl. Pijetan yang dalam kondisi berbatu menjadi jalan berpaving	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jl. Bebekan dalam kondisi berbatu dengan luas 2,5 x 600 meter serta kondisi jalan tanah dengan luas 2,5 x 1.500 meter</li> <li>Jl. Pijetan dalam kondisi berbatu dengan ukuran 2,5 x 1000 meter</li> <li>Dinding penahan gorong-gorong disepanjang Jl. Bebekan dan Jl. Pijetan belum permanen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jl. Bebekan menjadi jalan berpaving dengan ukuran 2,5 x 2.100 meter</li> <li>Jl. Pijetan menjadi jalan berpaving dengan ukuran 2,5 x 1000 meter</li> <li>Pembangunan dinding penahan dan gorong-gorong yang berada disepanjang Jl. Bebekan dan Jl. Pijetan</li> </ul>
5.	Pengadaan demo plot dan pendampingan kelompok budidaya ikan	Terealisasinya 3 unit demo plot	Belum ada lahan petani di Desa Blayu yang menggunakan sistem mina mendong	Pengadaan 3 unit kolam budidaya ikan dan sawah mendong digunakan sebagai demo plot untuk memberikan gambaran nyata kepada petani mengenai sistem mina mendong dan mina padi
6.	Pengadaan tempat penanganan ikan hidup	Terealisasinya 2 tempat penanganan ikan hidup	Belum ada kolam budidaya untuk kelompok Ngudi Mulyo III	Pengadaan 2 kolam penanganan ikan hidup yang digunakan kelompok Ngudi Mulyo III untuk membudidayakan ikan nila, mujair, tombro dan koi
7.	Pengadaan mesin pakan alternatif	Terealisasinya mesin pakan alternatif	Pembudidaya membeli pakan ikan buatan pabrik di toko-toko penjual peralatan budidaya ikan	Pengadaan 1 buah mesin pakan ikan yang diberikan kepada kelompok Ngudi Mulyo III. Mesin pakan ikan yang digunakan petani untuk membuat pakan

				ikan secara mandiri sehingga pendapatan petani tidak dipengaruhi oleh harga pakan ikan dipasaran yang terus mengalami kenaikan
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah dari Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang (2009).

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak lepas tangan dalam pelaksanaan Program Minapolitan. Sejak Program Minapolitan dijalankan, Pemerintah Kabupaten Malang ikut menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan sehingga Program Minapolitan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Menurut Bapak Mujib dan beberapa petani mina mendong dan mina padi, warga senang dengan adanya Program Minapolitan, karena Program Minapolitan memberikan manfaat yang baik kepada para petani dan kepada Desa Blayu. Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga semenjak adanya Program Minapolitan antara lain beberapa jalan di Desa Blayu mengalami perbaikan sehingga beberapa jalan yang awalnya rusak sekarang sudah dipaving dan di beberapa bagian desa dibangun DAM secara permanen sehingga sudah tidak rawan rusak. Selain itu program-program yang pernah didukung oleh Pemerintah kepada kelompok tani di Desa Blayu antara lain pemberian bantuan benih ikan, sarana dan peralatan untuk minamendong dan minapadi, diantaranya peralatan untuk pembuatan pakan ikan. Peralatan untuk pembuatan pakan ikan dirasakan kurang memberikan manfaat bagi petani mina mendong dan minapadi, karena para petani merasa kesulitan untuk mendatangkan bahan baku yang digunakan untuk membuat pakan, salah satunya adalah tepung ikan yang merupakan bahan dasar dalam membuat pakan ikan. Selain itu, petani juga merasa biaya yang dikeluarkan untuk

memproduksi pakan sendiri tidak berbeda jauh dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli pakan buatan pabrik karena bahan bakar yang dibutuhkan untuk membuat pakan sendiri sangat banyak. Selisih harga antara pakan buatan sendiri dan pakan buatan pabrik sebesar Rp 600,-. Walaupun biaya yang dikeluarkan untuk membuat pakan sendiri lebih murah dibandingkan dengan pakan buatan pabrik, namun petani tetap memilih pakan buatan pabrik. Hal ini dikarenakan kualitas pakan buatan sendiri tidak sebgas pakan buatan pabrik. Pakan hasil buatan sendiri tidak bisa mengapung, sedangkan ikan lebih suka makan pakan yang mengapung.

#### 4.3.2 Partisipasi Masyarakat

Program Minapolitan merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan dan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan. Dengan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program ini, maka peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan data dari kelompok Ngudi Mulyo III sampai tahun 2014 terdapat 19 petani mina mendong dan 4 petani mina padi di Desa Blayu. Namun setelah melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner diketahui bahwa jumlah petani yang menggunakan sistem mina mendong sebanyak 12 petani, jumlah petani yang menggunakan sistem mina padi sebanyak 4 petani, dan petani yang beralih ke budidaya ikan sebanyak 3 orang dan petani yang sudah berhenti menggunakan sistem mina sebanyak 4 orang. Penurunan jumlah petani yang menggunakan sistem mina mendong dipengaruhi oleh semakin susahnya mencari buruh pemotong mendong dan harga mendong yang sempat mengalami penurunan, sehingga dirasakan hasil dari bertani tidak dapat menutupi biaya produksi, akhirnya petani beralih dengan menanam sengon, serta ada beberapa

sawah yang mengalami kekeringan karena ada beberapa DAM yang rusak sehingga beralih menjadi petani sayuran.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Minapolitan di Desa Blayu pada penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain kontribusi masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

#### **A. Kontribusi dan Keterlibatan Masyarakat**

Petani mina padi dan mina mendong di Desa Blayu ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Program Minapolitan dengan menyiapkan lahan siap pakai yang dapat digunakan dalam sistem mina padi dan mina mendong, walaupun tidak semua petani yang mina padi dan mina mendong yang menggunakan semua sawah mereka untuk digunakan dalam sistem mina padi dan sistem mina mendong. Petani juga ikut membantu dalam pembangunan jalan Bebekan dan jalan Pijetan yang ada di Desa Blayu.

Petani menjalankan sistem mina padi dan mina mendong tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, semuanya berasal dari kemauan petani sendiri. Petani mendong dan petani padi memiliki berbagai macam alasan kenapa mereka mau mengikuti Program Minapolitan dengan menggunakan sistem mian padi dan mina mendong. Alasan para petani mau menjalankan sistem mina padi dan mina mendong antara lain:

- Tertarik dengan gambaran yang telah dipaparkan oleh penyuluh tentang hasil yang didapatkan dari mina mendong dan mina padi.
- Coba-coba, karena hobi memancing sehingga terlintas dalam pikiran untuk menebar ikan di sawah dan ternyata sistem tersebut dapat digunakan sebagai suatu hiburan dan usaha baru.
- Tertarik karena melihat sawah petani lain yang ada ikannya dan hasilnya dapat menjadi tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Tidak semua petani mina mendong dan mina padi ikut dalam kelompok tani Ngudi Mulyo III yang ada di Desa Blayu. Dari 19 petani mina mendong dan mina padi hanya 12 petani yang bergabung dalam kelompok dan 7 petani lainnya tidak tergabung dalam kelompok. Petani yang tergabung dalam kelompok aktif dalam musyawarah kelompok sehingga petani dapat memberikan kritik, saran, menyampaikan ide-ide yang ada, serta berbagi mengenai informasi-informasi terbaru kepada seluruh anggota kelompok. Petani yang tergabung dalam kelompok tidak hanya berbagi informasi kepada sesama petani yang ada dikelompok saja, melainkan juga memberikan informasi kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok. Secara tidak langsung, informasi yang diberikan mereka akan membuat petani lain untuk tertarik dan ingin mengikuti Program Minapolitan karena petani di Desa Blayu lebih mudah tertarik setelah melihat langsung yang ada dilapang dibandingkan dengan teori yang dipaparkan.

#### **4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Minapolitan**

##### **4.4.1 Faktor Pendukung**

Dalam setiap program yang dijalankan pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Faktor-Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu antara lain:

- Adanya 10 mata air dan 4 sungai yang mengalir di Desa Blayu sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam mencari air yang digunakan untuk mengairi sawah mereka.
- Adanya dukungan dari petani mina mendong dan mina padi dalam pelaksanaan Program Minapolitan dengan mempersiapkan lahan mereka sebelum sistem mina mendong dan mina padi dijalankan.
- Adanya dukungan dari pemerintah dalam Program Minapolitan bukan hanya membuat perencanaan program tetapi juga dalam pelaksanaannya seperti

perbaikan jalan, menyediakan lahan, menyediakan benih ikan, menyediakan alat pembuat pakan ikan, dan penyuluhan.

#### 4.4.2 Faktor Penghambat

Dalam setiap program yang dijalankan pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu antara lain:

- Di beberapa daerah Di Desa Blayu masih terdapat sawah-sawah yang DAMnya belum permanen. Hal ini menyebabkan rusaknya DAM pada saat musim hujan, khususnya saat hujan deras sehingga beberapa banyak ikan yang hilang terbawa arus. Perlu adanya pembangunan DAM yang permanen di beberapa daerah di Desa Blayu yang DAMnya masih belum permanen.
- Harga pakan ikan yang semakin lama semakin mahal sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah agar harga pakan ikan tidak semakin mahal dan tidak semakin memberatkan.
- Semakin berkurangnya buruh-buruh yang berminat sebagai pemotong mendong karena upahnya yang semakin rendah dan harga mendong yang semakin murah.
- Belum meratanya pemberian benih sehingga tidak semua petani mina mendong dan mina padi mengawali usahanya dengan menggunakan benih yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah agar bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dapat merata kesemua petani.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tentang implementasi Program Minapolitan di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Minapolitan di Desa Blayu terus berjalan, hal ini dapat dilihat pada penyampaian informasi, isi dan capaian program, dukungan dari masyarakat, dan pembagian tugas.

- Penyampaian informasi di Desa Blayu sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan melakukan pendekatan secara individu maupun kelompok namun tidak semua petani di mau menjalankan sistem mina mendong dan mina padi.
- Kegiatan pengembangan kawasan minapolitan yang dicanangkan oleh pemerintah antara lain pengembangan budidaya, pembinaan pasca panen dan pemasaran, pembinaan pengembangan usaha perikanan, serta beberapa kegiatan penunjang lainnya. Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah, masih ada beberapa kegiatan yang masih belum terlaksana secara maksimal.
- Respon petani di Desa Blayu terhadap Program Minapolitan baik, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan beberapa petani untuk menyiapkan lahan siap pakai walaupun sebagian besar petani masih ketergantungan dengan bantuan dari pemerintah.
- Kesuksesan pelaksanaan Program Minapolitan, pemerintah tidak hanya mengandalkan DKP Kabupaten Malang tetapi juga bekerjasama dengan beberapa instansi lainnya yang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2. Dalam pelaksanaan suatu program tidak dapat dipisahkan dari partisipasi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi pemerintah dan masyarakat Desa Blayu sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa:

- Pemerintah tidak lepas tangan dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu dan petani masih melaksanakan Program Minapolitan walaupun terjadi penurunan jumlah petani yang mengikuti program mina mendong dan mina padi. Sampai tahun 2013 bantuan pemerintah yang telah terealisasi yaitu pengadaan benih ikan nila untuk kelompok budidaya, pengadaan induk ikan nila untuk kelompok budidaya, pelatihan budidaya ikan, peningkatan jalan Bebekan yang dalam kondisi macadam, pembangunan jalan Bebekan yang dalam kondisi jalan tanah, peningkatan jalan Pijetan yang dalam kondisi berbatu, pengadaan demo plot kolam dan pendampingan kelompok budidaya ikan, pengadaan tempat penanganan ikan hidup, pengadaan sarana prasarana kampung nila, dan pengadaan mesin pakan alternatif.
- Petani mina mendong dan mina padi ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Minapolitan walaupun tidak semua petani tergabung dalam kelompok tani Ngudi Mulyo III. Petani menjalankan sistem mina padi dan mina mendong tanpa adanya paksaan.

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu yaitu adanya sumber mata air yang mencukupi, adanya dukungan dari masyarakat berupa lahan siap pakai, adanya dukungan dari pemerintah. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Minapolitan di Desa Blayu yaitu masih adanya DAM yang belum permanen, harga pakan ikan yang semakin lama semakin mahal, semakin berkurangnya buruh yang memotong mendong, belum meratanya bantuan dari pemerintah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tentang implementasi Program Minapolitan di Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, maka disarankan untuk:

1. Berdasarkan pernyataan Bapak MB yang mengatakan bahwa ada petani yang masih bergantung dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, maka petani di Desa Blayu sebaiknya berani untuk menjalankan usaha budidaya ikan dengan sistem mina mendong dan mina padi secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
2. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan secara berkala agar Program Minapolitan di Desa Blayu dapat terus berjalan dengan baik dan dapat terus dikembangkan sehingga masyarakat khususnya petani mina mendong dan mina padi dapat merasakan hasil yang sangat memuaskan dari Program Minapolitan.
3. Pemerintah hendaknya menyamakan harga ikan di Kecamatan Wajak agar tidak ada persaingan petani antar desa di Kecamatan Wajak.
4. Berdasarkan pendapat beberapa petani yang mengatakan bahwa harga pakan ikan semakin mahal sehingga keuntungan yang didapat tidak begitu banyak, maka pemerintah hendaknya bisa mengontrol harga pakan ikan agar tidak semakin memberatkan para pembudidaya ikan.
5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SH diketahui bahwa masih belum adanya evaluasi tahunan secara tertulis, maka sebaiknya DKP membuat evaluasi tahunan secara tertulis tentang kegiatan-kegiatan yang telah tercapai, sehingga mempermudah untuk mengembangkan Program Minapolitan di Kabupaten Malang, atau dapat melakukan SWOT untuk mengevaluasi Program Minapolitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2010. **Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan “Pengolahan Dan Analisis Data Hasil Penelitian”**. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ansoriyah, Lailiyul. 2014. **Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sidoarjo**. Universitas Brawijaya. Malang.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. 2014. **Perkembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang**. Malang
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 18/Men/2011. **Pedoman Umum Minapolitan**. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 39/Men/2011. **Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 32/Men/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan**. Jakarta.
- Koryati, Nyimas Dwi, Hidayat, Wisnu, dan Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. **Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah**. YPAPI. Yigyakarta.
- Kristanto, Arif Wahyu. 2010. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Pembangunan Infrasturktur Pedesaan (PPIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**. Diakses di <http://digilib.its.ac.id> pada hari Selasa, 16 desember 2014.
- Lubis, Asri. 2009. **Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED Vol. 6 No. 2.
- Muclisin, Z. A, Nazir, Muhammad, dan Musman, Nusri. 2012. **Pemetaan Potensi Daerah Untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Beberapa Lokasi Dalam Provinsi Aceh: Suatu Kajian Awal**. Depik, 1 (1): 68-77. ISSN 2089-7790.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. **Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang**. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Malang. 2009. **Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Malang**. Malang

Pemerintah Kabupaten Malang. 2011. **Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.** Malang

Riduwan. 2003. **Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.** Alfabeta. Bandung.

Salenus, Rony. 2012. **Implementasi Program Pemberdayaan Minapolitan Di Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat.** Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sittaningsih, Annisa. 2014. **Studi Pengolahan Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Di Desa Sidoarjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur.** Universitas Brawijaya. Malang.

Soetrisno, Loekman. 1995. **Menuju Masyarakat Partisipatif.** Kanisius. Yogyakarta.

Suryana. 2010. **Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.** Universitas Pendidikan Indonesia.

Sugiarti, Rara. 2013. **Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Pacitan.** Cakra Wisata, Vol. 13 Jilid 1.

Supranto, J. **Sttistik: Teori dan Aplikasi.** Erlangga. Jakarta.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. **Metodologi Penelitian Sosial.** Bumi Aksara. Jakarta.

Wijayanti, Nadia Sasmita. 2013. **Kebijakan Publik.** Diakses pada [https://www.academia.edu/4694245/Pengertian\\_Jenis-jenis\\_dan\\_Tingkat-tingkat\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.academia.edu/4694245/Pengertian_Jenis-jenis_dan_Tingkat-tingkat_Kebijakan_Publik) pada hari Sabtu, 20 Desember 2014.

Yin, Robert K. 2013. **Studi Kasus Desain Dan Metode.** PT Raja Grafindo Tinggi. Jakarta.

Zulham, Armen. 2010. **Membangun Konsep Minapolitan.** Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian Skripsi



## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Lahan mina padi siap tanam



Sawah mina padi



Sawah mina mendong



Sawah mina mendong



Kolam budidaya ikan



Jalan Bebekan



Jalan di sekitar sawah dan kolam budidaya ikan



Wawancara dengan bapak Muklas, salah satu petani mina padi

